

Transparansi Informasi Meningkatkan Level Kepercayaan terhadap Laporan Kinerja Pemerintah

Hariany Idris*

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Makassar

ABSTRACT

This research aims to further investigate how transparency can be a way for the government to increase public confidence in the processes and performance they carry out in order to provide services to the public in Indonesia. To test this, a 2x2 factorial experiment was carried out involving 57 students who had programmed the Public Sector Accounting course. The results showed that the interaction between the level of information and the level of public trust. Openness / transparency which influences individuals to tend to have high trust in government information. Meanwhile, information with a low level of transparency tends to lead to a low level of trust as well.

Penelitian bertujuan untuk menginvestigasi lebih jauh bagaimana transparansi dapat menjadi jalan bagi pemerintah untuk dapat meningkatkan kepercayaan publik atas proses dan kinerja yang mereka lakukan dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat di Indonesia. Untuk menguji hal tersebut dilakukan eksperimen faktorial 2x2 dengan melibatkan 57 mahasiswa yang telah memprogramkan mata kuliah Akuntansi Sektor Publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat interaksi antara level transparansi informasi dan tingkat kepercayaan publik. Keterbukaan/transparansi yang tinggi mempengaruhi individu untuk cenderung memiliki kepercayaan yang tinggi terhadap informasi pemerintah. Sedangkan informasi dengan level transparansi rendah cenderung menyebabkan tingkat kepercayaan yang rendah pula.

Keywords:

tranparency, trust, goverment
kepercayaan, transparansi, pemerintah

* Corresponding Author at Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Makassar, Jl. Raya Pendidikan, Makassar 90221 South Sulawesi, Indonesia.
E-mail address: hariany.idris@unm.ac.id (author#1)

1. PENDAHULUAN

Beberapa publikasi hasil survei nasional oleh berbagai lembaga survei di Indonesia akhir-akhir ini yang menunjukkan rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat (public trust) terhadap kinerja pemerintah dalam beberapa tahun terakhir. Menurut Lingkaran Survei Indonesia (2015) kepuasan publik atas kinerja pemerintah terus menurun. Publikasi lainnya juga bersepakat bahwa kinerja pemerintah beberapa tahun terakhir sangat rendah dari yang seharusnya (Indobarometer, 2015; Pol-Tracking, 2015).

Fenomena tersebut menuntun kearah pertanyaan, apakah memang kinerja pemerintah selama ini masih jauh dari harapan publik, ataukah publik yang memiliki keterbatasan akses pada informasi kinerja pemerintah. Hal ini menarik untuk menjadi kajian para peneliti bidang akuntabilitas kinerja sektor publik.

Dari segi kajian literatur ilmiah, permasalahan kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah kemudian mengarahkan peneliti mengemukakan konsep New Public Management (NPM) dimana salah satu konsep utamanya adalah transparansi dalam pengungkapan outcome kinerja pemerintah untuk tujuan membangun kepercayaan publik (Pina et al., 2007). Telah banyak penelitian yang mengungkapkan hubungan antara transparansi dengan kepercayaan. Menurut Hood (2006) dalam Grimmelikhuijsen (2012) bahwa transparansi menggambarkan budaya “keterbukaan” dimana hal tersebut terbukti berhubungan positif dengan kepercayaan. Selanjutnya Cook et al. (2010) menemukan bahwa rendahnya kepercayaan publik kepada pemerintah salah satu penyebabnya adalah bahwa pemerintah jarang menyuguhkan informasi kinerja dan proses pemerintahan yang faktual kepada masyarakat.

Namun, terdapat pemikiran lain yang tidak sejalan dengan hal itu. Penjelasan dari teori bounded rationality (March, 1978) menyimpulkan bahwa tidak semua informasi akan digunakan seseorang dalam mengambil keputusan. Seseorang akan sukar mempertimbangkan semua alternatif dan informasi yang ada, sehingga menggunakan rasionalitasnya untuk menyederhanakan masalah dengan keputusan yang seadanya.

Banyak terdapat penelitian yang menemukan bahwa terdapat pengaruh emosional seseorang berkaitan dengan kepercayaan terhadap pemerintah. Grimmelikhuijsen (2012) menemukan bahwa transparansi dapat berperan dalam rangka meningkatkan tingkat kepercayaan publik melalui kognisi (cognition) dan perasaan (feeling) individu dalam masyarakat terhadap pemerintah. Berdasarkan hal tersebut, peneliti kemudian berinisiatif untuk menginvestigasi lebih jauh bagaimana transparansi dapat menjadi jalan bagi pemerintah untuk dapat meningkatkan

kepercayaan publik atas proses dan kinerja yang mereka lakukan dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat di Indonesia.

Penelitian ini melakukan replikasi dari studi yang telah dilakukan oleh Grimmelikhuijsen (2012) yang menguji hubungan transparansi atas outcome kinerja pemerintah kepada publik dengan kepercayaan masyarakat. Grimmelikhuijsen melakukan eksperimen secara online dengan menggunakan 658 partisipan yang diperoleh dari panel opini salah satu kementerian di Belanda.

Peneliti merasa bahwa studi tersebut penting untuk diujikan kembali di Indonesia karena baru berselang satu dekade lebih masyarakat Indonesia mengalami peristiwa reformasi dengan drama penumbangan rezim pemerintahan dimana buruknya kualitas para pemimpin dan pejabat terungkap ke publik secara vulgar. Ditambah lagi dengan berbagai temuan kasus-kasus korupsi pejabat akhir-akhir ini yang dipublikasikan oleh media secara besar-besaran. Hal tersebut menurut peneliti masih mempengaruhi persepsi publik terhadap transparansi kinerja pemerintah saat ini.

Pengkomunikasian informasi hasil dan capaian kinerja pemerintah diharapkan mampu menjadi sarana untuk memperoleh kepercayaan publik atas proses pelayanan yang dilakukan pemerintah sehingga mendapat legitimasi dan dukungan dari masyarakat sebagai stakeholder. Namun, transparansi menjadi dipertanyakan bila dikaitkan dengan rasionalisme individu terhadap penggunaan informasi dalam pengambilan keputusan.

2. REVIU LITERATUR

2.1 *Tranparansi Hasil Kinerja Pemerintah*

Grimmelikhuijsen dan Welch (2012) menjelaskan bahwa transparansi diartikan sebagai ketersediaan informasi tentang organisasi dan penyelenggara organisasi dimana pihak luar (eksternal) dimungkinkan untuk melakukan monitoring terhadap proses pekerjaan internal organisasi tersebut atau mengontrol kinerja dari organisasi dan penyelenggaranya. Terdapat dua dimensi dari transparansi; yakni tingkat komprehensibilitas dan kelengkapan dari segi runtutan waktu (timelines), sehingga informasi tersebut layak atau relevan untuk digunakan dalam pengambilan keputusan.

Berkaitan dengan komprehensibilitas, Larson (1998) dalam Grimmelikhuijsen (2012) menekankan bahwa transparansi mencakup pada kesederhanaan dan komprehensibilitas dari informasi yang disajikan. Sedangkan dari segi kelengkapan runtutan waktu, Heald (2006) dalam Grimmelikhuijsen (2012) menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang mendasar antara informasi yang real-time dengan informasi yang tidak terbarukan (retrospective). Meskipun antara real-time dan retrospective tidak dibedakan menjadi informasi baru dan informasi yang

usang, namun faktor ketepatan waktu sangat penting dalam aspek transparansi. Hal tersebut berkaitan dengan kerelevansian data untuk pengambilan keputusan.

2.2 Tingkat Kepercayaan Publik (Public Trust)

Rousseau et al. (1998) mendefinisikan kepercayaan sebagai kondisi kejiwaan (*psikologis*) seseorang yang menyebabkan timbulnya niat (*intention*) untuk menerima kelemahan orang lain yang berdasarkan pada ekspektasi positif terhadap niat atau perilaku orang lain tersebut. Tingkat kepercayaan tersebut memiliki beberapa dimensi yang membangunnya, antara lain: kompetensi (*competence*), kebaikan (*benevolence*), dan kejujuran (*honesty*).

2.3 Pengaruh Pengetahuan (Knowledge) Terhadap Kepercayaan (Trust) Publik

Apabila masyarakat telah mendapatkan informasi kinerja pemerintahan secara transparan, maka hal tersebut dapat menambah pengetahuan publik akan bagaimana kondisi kinerja pemerintah sebenarnya. Penelitian Cook et al. (2010) yang menemukan bukti bahwa peningkatan pengetahuan (*knowledge*) membantu dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam organisasi pemerintah.

2.4 Hipotesis Penelitian

Penelitian ini mengajukan hipotesis untuk diujikan bahwa tingkat transparansi informasi dalam laporan kinerja pemerintah mempengaruhi tingkat kepercayaan publik.

3. METODE

3.1 Desain Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan dengan metoda eksperimen yang menyadur dari Grimmelikhuijsen (2012). Dalam penelitian ini terdapat satu variabel dependen yaitu tingkat kepercayaan individu. Variabel kepercayaan individu diukur dengan meminta partisipan untuk memberikan pendapatnya dalam pertanyaan yang mewakili ketiga jenis kepercayaan individu. Partisipan menjawab pertanyaan tersebut setelah membaca skenario eksperimen. Skala Likert 1-7 digunakan untuk mengukur respons dari partisipan. Semakin tinggi partisipan memberikan angka penilaiannya, semakin cenderung ia percaya terhadap pemerintah.

Variabel independen dalam penelitian ini adalah transparansi informasi. Pengukuran transparansi informasi berasal dari model pengukuran transparansi yang dikembangkan oleh Kohlberg (1969) dan Rest (1979) dalam bentuk instrumen Defining Issues Test (DIT). Instrumen ini berbentuk kasus dilema etika. Transparansi informasi diukur melalui instrumen yang dikembangkan dari Rest (1979) untuk mengukur level keterbukaan sebuah informasi melalui empat skenario. Pembagian skor level transparansi (tinggi dan rendah) menggunakan nilai median P-score dari total sampel.

Pengukuran variabel pengendalian internal terdiri dari dua skema dalam skenario: ada elemen pengendalian internal dan tidak ada elemen pengendalian internal. Kondisi adanya elemen pengendalian internal digambarkan melalui adanya penerapan wewenang dan tanggung jawab di organisasi, pencatatan transaksi berkala, adanya pengendalian fisik, sistem akuntansi yang komprehensif, serta pemantauan dan evaluasi berkala. Kondisi tidak adanya elemen pengendalian internal digambarkan dalam skenario berupa tidak adanya penerapan wewenang dan tanggung jawab yang jelas di organisasi, pencatatan transaksi yang tidak berkala, tidak adanya pengendalian fisik, sistem akuntansi yang tidak dapat mencatat seluruh kegiatan operasional instansi serta tidak adanya pemantauan dan evaluasi secara berkala di dalam instansi.

3.2 Desain Eksperimen

Partisipan dalam penelitian ini adalah mahasiswa S1 Program Studi Sarjana Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Makassar yang telah memprogramkan mata kuliah Akuntansi Sektor Publik (Akuntansi Pemerintah). Alasan pemilihan sampel mahasiswa tersebut adalah karena mahasiswa tersebut telah mendapat porsi kuliah di bidang pemerintahan lebih banyak dibandingkan mahasiswa lainnya sehingga diharapkan dapat mendekati karakteristik sektor publik seperti dalam skenario eksperimen. Total sebanyak 50 mahasiswa yang berpartisipasi dalam eksperimen.

Penelitian ini menggunakan rancangan eksperimen faktorial 2x2 untuk menguji pengaruh transparansi informasi dan terhadap tingkat kepercayaan individu. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kepercayaan individu, sedangkan variabel independennya adalah tingkat transparansi (level transparency tinggi dan rendah).

Peneliti mengamati kecenderungan individu memiliki kepercayaan dengan membagi partisipan ke dalam empat grup: (1) Grup 1: kelompok level transparansi tinggi dalam kondisi ada elemen pengendalian internal, (2) Grup 2: kelompok level transparansi tinggi dalam kondisi tidak terdapat elemen pengendalian internal, (3) Grup 3: kelompok level transparansi rendah dalam kondisi terdapat elemen pengendalian internal, dan (4) Grup 4: kelompok level transparansi rendah dalam kondisi tidak terdapat elemen pengendalian internal.

3.3 Evaluasi Manipulasi Eksperimen

Cek manipulasi dilakukan dengan menguji partisipan untuk menentukan benar atau salah dengan dua pertanyaan. Pertanyaan pertama adalah mengenai tugas partisipan selaku masyarakat Kabupaten X. Pertanyaan kedua adalah mengenai gambaran elemen pengendalian internal di Kabupaten X. Hasil analisis cek manipulasi menunjukkan bahwa dari 50 partisipan, hanya sebanyak 37 partisipan (74%) yang lolos cek manipulasi dan lolos dari eliminasi, sehingga

partisipan yang tidak lolos cek manipulasi dan tidak lolos eliminasi adalah sebanyak 13 orang (26%).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data dalam penelitian ini terdistribusi dengan normal. Hasil pengujian normalitas dengan *Kolmogorov-Smirnov Test* menunjukkan nilai *Asymp. Sig* 0,411 (diatas 0,005), dengan hasil tersebut dapat dikatakan bahwa data terdistribusi dengan normal sehingga memenuhi salah satu asumsi *analysis of variance* (ANOVA). *Tests of homogeneity of variance* dilakukan untuk mengetahui apakah keempat perlakuan (perlakuan 1,2,3, dan 4) mempunyai varian yang sama. Hasil uji statistik menunjukkan nilai *levene statistic* sebesar 0,176 (diatas 0,005). Hal ini menunjukkan bahwa setiap kelompok subjek memenuhi varian yang sama sehingga telah memenuhi asumsi ANOVA (Hair et al, 2006). Sedangkan untuk uji *Analysis of Variance-Between Groups* menunjukkan *p-value* signifikan pada 0,000. Hasil tersebut menunjukkan bahwa ada perbedaan yang signifikan antar grup. Untuk menjawab hipotesis, dibawah ini akan ditampilkan tabel pengaruh level moral individu dan elemen pengendalian internal terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi dan deskripsi statistik untuk melihat perbedaan antar grup.

Ekspektasi peneliti bahwa kondisi elemen pengendalian internal akan mempengaruhi hubungan antara level transparansi dengan kepercayaan individu. Dari hasil pengujian diketahui bahwa terdapat interaksi antara level transparansi dengan elemen pengendalian internal ($F= 22.877$ dengan *p-value* 0,000). Bukti mengenai kekuatan pengaruh variabel interaksi tersebut menunjukkan bahwa ada saling ketergantungan antara level transparansi informasi dengan kondisi elemen pengendalian internal.

Kondisi ada atau tidak ada pengendalian internal dalam sebuah organisasi akan membuat tingkat kepercayaan masyarakat akan menurun bila transparansi informasi pemerintah rendah. Perubahan level kondisi elemen pengendalian internal (ada dan tidak ada elemen pengendalian internal akan mengakibatkan dampak perubahan kepercayaan pada informasi dengan level transparansi tertentu (tinggi atau rendah). Data menunjukkan perbedaan mean tiap grup dengan level moral tertentu dan kondisi elemen pengendalian internal tertentu. Untuk mengetahui perbedaan mean grup yang signifikan, maka dilakukan analisis *post-hoc*.

Berdasarkan hasil pengujian *tukey t-statistics*, peneliti membandingkan antara mean Grup 1 dan 2 untuk melihat pengaruh kondisi elemen pengendalian internal terhadap kecenderungan kepercayaan publik. Dari perbandingan kedua grup tersebut didapatkan *mean difference* sebesar 0,2667 dengan nilai $p=0,821$. Hasil ini mengindikasikan bahwa tidak ada perbedaan yang

signifikan antara Grup 1 dan Grup 2. Hal ini berarti kondisi ada dan tidak ada elemen pengendalian internal tidak mempengaruhi kepercayaan individu dengan informasi level transparansi yang tinggi.

Hasil penelitian ini membuktikan apa yang ada dalam hirarki tahap perkembangan kepercayaan. Semakin tinggi tahapan transparansi sebuah informasi (tahapan post-konvensional), semakin individu tersebut memperhatikan atau mempercayai, apalagi apabila informasi tersebut untuk kepentingan individunya. Semakin tinggi level transparansi informasi, individu yang terkait akan semakin terbuka atas data dan fakta dari informasi tersebut.

Informasi dengan level transparansi yang tinggi akan mengarahkan individu yang menggunakannya memperhatikan atas detail-detail yang dimuat oleh informasi tersebut, maka ada atau tidak adanya elemen pengendalian internal tidak akan mengubah tingkat kepercayaannya. Hasil penelitian ini sekaligus memperkuat hasil dari penelitian-penelitian yang sebelumnya bahwa informasi yang memiliki level transparansi yang tinggi akan lebih diterima, sehingga akan cenderung berguna dengan baik.

Selanjutnya, dari hasil pengujian peneliti membandingkan antara Grup 4 dan Grup 2 yang merupakan representasi dari hipotesis. Dari hasil perbandingan mean kedua grup, didapatkan mean difference 2,3143 dengan nilai $p=0,000$. Hasil ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara Grup 4 dan Grup 2. Informasi yang memiliki level transparansi rendah (Grup 4) lebih cenderung menyebabkan ketidakpercayaan dibandingkan informasi yang memiliki level transparansi tinggi (Grup 2) dalam kondisi tidak terdapat elemen pengendalian internal.

Dalam keadaan tidak terdapat elemen pengendalian internal dalam organisasi, informasi dengan level transparansi rendah akan menjadi tidak bermanfaat. Hal ini sesuai dengan yang ada dalam stage 2 Kohlberg (level pre-conventional) yaitu informasi yang memiliki level transparansi rendah tidak memiliki nilai.

Harapan peneliti bahwa informasi dengan level transparansi rendah cenderung menyebabkan ketidakpercayaan pada kondisi tidak terdapat elemen pengendalian internal dibandingkan pada kondisi terdapat elemen pengendalian internal. Berdasarkan data *tukey t-statistics*, peneliti membandingkan antara mean Grup 4 dan 3 dan didapatkan *mean difference* sebesar 1,8681 dengan nilai $p=0,000$. Mean Grup 3 sebesar 0,89872 lebih rendah dibandingkan *mean* grup 4 yaitu sebesar 3,7857. Hal ini berarti informasi dengan level transparansi rendah dalam kondisi tidak terdapat elemen pengendalian internal (Grup 4) cenderung menyebabkan ketidakpercayaan jika dibandingkan dengan informasi dengan level transparansi rendah dalam kondisi terdapat elemen pengendalian internal (Grup 3).

Hasil penelitian ini juga mendukung penelitian sebelumnya yang menemukan bahwa informasi dengan level transparansi lebih berorientasi pada syarat dan hukum yang mungkin telah diatur sehingga dalam kondisi ada elemen pengendalian internal maka tingkat kepercayaan atas informasi tersebut meningkat. Hasil penelitian ini turut mendukung penelitian dari Maroney (2006) yang menemukan bahwa peraturan dapat menjadi alat yang efektif agar informasi yang dipublikasikan pemerintah akan bermanfaat sehingga memastikan tujuan informasi dipublikasi tersebut tercapai.

5. KESIMPULAN

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membandingkan kecenderungan kepercayaan publik terhadap informasi yang memiliki level transparansi rendah dan level transparansi tinggi dalam kondisi terdapat elemen pengendalian internal organisasi dan tidak terdapat elemen dan pengendalian internal organisasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat interaksi antara level transparansi informasi dengan pengendalian internal. Artinya perubahan pada satu level faktor level transparansi atau pada kondisi pengendalian internal, akan menyebabkan perubahan individu dalam hal kepercayaannya terhadap informasi yang dipublikasi oleh Pemerintah.

Hasil dari penelitian ini juga mengindikasikan bahwa informasi yang memiliki level transparansi tinggi cenderung menyebabkan kepercayaan publik tinggi dalam kondisi terdapat elemen pengendalian internal maupun dalam kondisi tidak terdapat elemen pengendalian internal di organisasi. Hasil dari pengujian menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan pada informasi dengan level transparansi tinggi untuk menyebabkan ketidakpercayaan publik, baik dalam kondisi ada maupun tidak ada elemen pengendalian internal di organisasi.

Elemen pengendalian internal dapat menjadi alat yang mampu mengurangi ketidakpercayaan publik atas informasi Pemerintah. Hasil pengujian membuktikan bahwa dalam kondisi terdapat elemen pengendalian internal, informasi yang memiliki level transparansi rendah cenderung tidak menurunkan tingkat kepercayaan publik. Sebaliknya dalam kondisi tidak terdapat elemen pengendalian internal, informasi dengan level transparansi rendah akan cenderung menurunkan tingkat kepercayaan publik.

Ada dua implikasi penting dari penelitian ini. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memasukkan variabel-variabel yang terkait demografis responden (gender, posisi di organisasi, pengalaman bekerja, usia, dan pendidikan) untuk melihat pengaruh variabel-variabel tersebut terhadap kecenderungan kepercayaan publik. Penelitian selanjutnya juga disarankan untuk lebih

fokus pada desain eksperimen yang lebih sempurna agar lebih dapat menggambarkan kondisi yang lebih nyata.

Terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian ini, diantaranya terkait semua informasi yang menggambarkan elemen pengendalian internal organisasi kemungkinan tidak tersedia di dalam skenario yang diberikan karena elemen pengendalian internal di sektor pemerintahan di dunia nyata lebih kompleks.

6. REFERENSI

- Cook, F Lomax. Jacobs LR. & Kim D. 2010. Trusting What You Know: Information, Knowledge, and Confidence in Social Security. *Journal of Politics* Vol. 72 No. 2 (2010): 397-412.
- Grimmelikhuijsen SG. 2012. Linking transparency, knowledge and citizen trust in government. *International Review of Administrative Sciences* (2012): 50-73.
- Grimmelikhuijsen SG & Welch EW. 2012 Developing and Testing a Theoretical Framework for Computer-Mediated Transparency of Local Governments. *Public Administration Review* Vol. 72 (2012): 562-571.
- Idris, H., & Syachbrani, W. 2018. Accountants Moral Judgement In Religious And Non-Religious School Background's Perspective. *Hasanuddin Economics and Business Review*, 2(2), 97-103.
- Juliani, D. Zuhria, I & Syachbrani, W. 2013. Finding the Empirical Evidence of Communication Performance and Services Quality Relationships in Public Healthcare. *The 2nd Asia-America-Africa-Australia Public Finance Management Conference*.
- March, J G. 1978. Bounded rationality, ambiguity, and the engineering of choice. *The Bell Journal of Economics* Vol. 9 No. 2 (1978): 587-608.
- Pina, Vicente. Lourdes Torres & Bacilio Acerete. 2007. Are ICTs improving transparency and accountability in the EU regional and local governments? An empirical study. *Critical Perspectives on Accounting* Vol. 18 (2007): 583602.
- Rousseau DM, Sitkin SB, Burt RS and Camerer C. 1998. Not so Different After All: A Cross-Discipline View of Trust. *Academy of Management Review* Vol. 23 No. 3 (1998): 393-404.
- Syachbrani, W., & Yahya, M. 2018. Realisasi Perencanaan Dan Pelaksanaan Tata Kelola Keuangan Pemerintah Desa. *Bongaya Journal for Research in Management (BJRM)*, 1(2), 45-55.